

## OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA MELALUI *E-GOVERNMENT* DI DESA AMBULU, KABUPATEN JEMBER

## OPTIMIZING VILLAGE APPARATUS CAPACITY DEVELOPMENT THROUGH E-GOVERNMENT IN AMBULU VILLAGE, JEMBER REGENCY

Eka Septia Pratiwi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UM Jember

Email: [ekaseptiapratiwi1@gmail.com](mailto:ekaseptiapratiwi1@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan kapasitas aparatur desa melalui e-Government di Desa Ambulu, Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif, meliputi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik. Hasil menunjukkan bahwa e-Government berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun terdapat kesenjangan dalam infrastruktur teknologi, literasi digital, dan pelatihan aparatur desa. Keterbatasan jaringan internet dan resistensi terhadap perubahan budaya menjadi tantangan utama. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Peningkatan infrastruktur dan program pelatihan yang relevan sangat penting untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, sehingga Desa Ambulu dapat menjadi lebih modern dan partisipatif.

**Kata kunci:** E-Government, Kapasitas Desa, Kesenjangan Digital

### Abstract

*This research aims to optimize the capacity of village officials through e-Government in Ambulu Village, Jember Regency. The method used is a qualitative approach with descriptive case studies, including documentation, in-depth interviews and observations. Data analysis was carried out using thematic analysis techniques. The results show that e-Government has the potential to improve the quality of public services, but there are gaps in technological infrastructure, digital literacy, and training for village officials. Limited internet networks and resistance to cultural change are the main challenges. The implications of this research show the need for collaboration between village government, community and the private sector. Improving infrastructure and relevant training programs are essential to address gaps and improve governance, so that Ambulu Village can become more modern and participatory.*

**Keywords:** E-Government, Village Capacity, Digital Divide

### LATAR BELAKANG

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa berbasis teknologi informasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Di era digital, penerapan e-Government sangat penting untuk mengatasi tantangan pelayanan yang semakin kompleks. E-Government memudahkan penyediaan informasi dan layanan kepada masyarakat, mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat (Yusuf, 2021). Desa Ambulu di Kabupaten Jember memiliki potensi besar dalam penerapan e-Government, namun masih menghadapi berbagai kesenjangan yang perlu diatasi.

Kesenjangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya jaringan internet yang tidak merata dan terbatasnya akses terhadap perangkat teknologi. Hal ini membatasi kemampuan aparatur desa untuk memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan aparatur desa dan masyarakat membuat sistem e-Government sulit dioperasikan secara efektif. Kesenjangan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan juga menjadi hambatan utama, karena kurangnya pelatihan bagi staf desa menghambat penggunaan teknologi secara optimal (Akhmad et al., 2020).

Selain itu, kurangnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan sektor swasta menghambat integrasi dan keberlanjutan sistem e-Government. Kesenjangan dalam koordinasi ini memengaruhi efektivitas penerapan e-Government dan memerlukan kerja sama yang baik antara semua pihak untuk berhasil (Wicaksono & Ilmi, 2022).

Di sisi lain, penerapan e-Government di Desa Ambulu juga membawa beberapa dampak positif. Salah satunya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan transparansi pemerintahan. E-Government membuat proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Namun, terdapat tantangan sosial dan budaya terkait dengan penolakan terhadap perubahan, terutama di kalangan mereka yang terbiasa dengan sistem lama. Fenomena lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan data pribadi dan keamanan digital, yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan informasi melalui platform digital.

Untuk mengatasi kesenjangan dan tantangan ini, perlu ada peningkatan pelatihan, perbaikan infrastruktur, serta pengembangan strategi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan mengoptimalkan e-Government, Desa Ambulu dapat membangun pemerintahan desa yang lebih modern, partisipatif, dan berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Tata Kelola Berbasis Kolaborasi**

Tata kelola kolaboratif melibatkan banyak aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini penting di era digital karena memungkinkan pertukaran informasi yang lebih transparan dan efektif. Kerja sama ini meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui teknologi informasi (e-Government), memperkuat partisipasi masyarakat, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan sosial yang kompleks (Ansell dan Gash, 2020). Dengan adanya tata kelola kolaboratif, tercipta sinergi antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **Prinsip-prinsip Good Governance**

Prinsip-prinsip Good Governance merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adil, dan efektif. Dalam konteks e-Government, terdapat empat prinsip utama:

1. Akuntabilitas: Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjelaskan keputusan dan tindakannya kepada publik, yang difasilitasi oleh teknologi informasi (Bovens, 2019).
2. Transparansi: Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dapat diwujudkan melalui akses informasi publik, seperti portal desa dan aplikasi web (Grindle, 2019).
3. Partisipasi: Partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui platform online yang memungkinkan kontribusi masyarakat dalam pengembangan kebijakan.
4. Efisiensi: Penggunaan sumber daya dalam pelayanan publik dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (World Bank, 2021).

### **Metode Kualitatif dalam Pengembangan Aparatur Desa**

Metode kualitatif sangat efektif dalam memahami dinamika sosial-budaya pengembangan aparatur desa, khususnya dalam konteks implementasi e-Government. Studi ini mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan hambatan yang dihadapi staf desa melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi partisipan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pengembangan kapasitas staf desa (Creswell,

2018). Kontribusi metode kualitatif adalah memberikan pemahaman mendalam tentang konteks lokal yang mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti, sehingga meningkatkan efektivitas pengembangan kapasitas aparatur desa.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa berbasis teknologi informasi (e-Government) di Desa Ambulu, Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan e-Government berlangsung, tantangan yang perlu diatasi, dan peran berbagai aktor yang terlibat dalam proses tersebut, yang akan diselidiki secara rinci melalui studi kasus deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis konteks, proses, dan dinamika implementasi e-Government di tingkat desa, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

### Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Dokumentasi

Penelitian menggunakan peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan program, dan hasil penelitian sebelumnya untuk memahami latar belakang dan strategi implementasi.

#### 2. Wawancara Mendalam

Dilakukan dengan perangkat desa, masyarakat, dan pihak terkait untuk menggali informasi tentang pengalaman, tantangan, dan dampak dari implementasi e-Government. Informan utama dalam penelitian ini mencakup:

- a. **Perangkat Desa:** Kepala desa, sekretaris desa, dan staf yang terlibat langsung dalam e-Government.
- b. **Masyarakat:** Warga yang menerima manfaat dari layanan berbasis teknologi ini.
- c. **Pemangku Kepentingan:** Lembaga pemerintah, penyedia teknologi, dan lembaga pelatihan yang mendukung pengembangan kapasitas aparatur.

#### 3. Observasi

Observasi langsung dilakukan terhadap proses penerapan teknologi informasi, interaksi masyarakat, dan perubahan administrasi di Desa Ambulu.

### Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mengacu pada panduan yang diberikan oleh Creswell (2021) tentang metode analisis data kualitatif, yang meliputi pengumpulan data, pengorganisasian, pengkodean, dan interpretasi. Langkah-langkah analisis meliputi:

#### 1. Analisis Tematik

Digunakan untuk mengidentifikasi tema seperti faktor pendukung, hambatan, dan hasil implementasi. Metode ini mengacu pada Braun & Clarke (2022) dengan enam tahap analisis: memahami data, menghasilkan kode awal, mencari tema, mereview, mendefinisikan tema, dan menyusun laporan.

#### 2. Analisis Naratif

Berfokus pada pengalaman dan perspektif aktor yang terlibat, mengacu pada pendekatan Riessman (2021), yang menyoroti pentingnya konteks dalam narasi.

#### 3. Grounded Theory

Mengembangkan konsep-konsep baru untuk menjelaskan hubungan antara kapasitas aparatur desa dan keberhasilan e-Government, menggunakan pendekatan konstruktivis dari Charmaz (2022).

### **Software Pendukung**

Penelitian ini menggunakan NVivo atau ATLAS.ti untuk mempermudah pengorganisasian, pengkodean, dan analisis data kualitatif secara efisien. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang pengembangan kapasitas aparatur desa melalui e-Government serta rekomendasi berbasis bukti untuk implementasi yang lebih baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pentingnya Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa**

Peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam konteks Desa Ambulu, pengembangan kapasitas aparatur sangat diperlukan agar mereka dapat mengelola sumber daya dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang berkelanjutan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan keterampilan komunikasi, sangat penting (Wisnumurti et al., 2023). Pelatihan berbasis model evaluasi seperti Kirkpatrick dapat mengukur dampak program pelatihan, mulai dari kepuasan peserta hingga perubahan perilaku dan hasil nyata di lapangan (Praseptiawan et al., 2023). Sebagai contoh, melalui pelatihan yang terstruktur, aparat desa mampu memahami peran mereka lebih baik dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa.

Tantangan utama dalam pengembangan kapasitas aparatur desa adalah kebutuhan akan pelatihan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi lokal. Program pelatihan yang hanya fokus pada aspek administratif tanpa memperhatikan keterlibatan masyarakat cenderung gagal. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan partisipasi masyarakat sangat penting (Jayadiputera et al., 2023). Pendekatan partisipatif ini memungkinkan warga untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan desa. Program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak akan memperkuat kapasitas aparatur desa dan memajukan tata kelola pemerintahan desa.

### **B. Tantangan dalam Implementasi E-Government di Desa Ambulu**

Implementasi e-Government di Desa Ambulu menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan budaya. Keterbatasan infrastruktur, khususnya akses internet yang terbatas di daerah terpencil dan kurangnya perangkat yang memadai, menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem digital di desa (Karunia et al., 2023). Aksesibilitas layanan e-Government yang terbatas, terutama bagi kelompok rentan, memperburuk situasi, karena mereka kesulitan dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan.

Namun, tantangan ini tidak menghalangi upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital. E-Government dapat dioptimalkan dengan memfokuskan pada peningkatan literasi digital baik bagi aparat desa maupun masyarakat (Hardi & Gohwong, 2020). Pemerintah daerah harus memastikan adanya penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung infrastruktur dan pelatihan. Pelatihan yang berbasis pada teknologi dan penerapan e-Government akan memungkinkan desa untuk mengelola informasi dengan lebih efisien, serta mempercepat proses pelayanan publik.

Keterlibatan sektor swasta dalam menyediakan teknologi yang tepat guna dan dukungan bagi masyarakat dalam bentuk pelatihan juga menjadi penting (Suwarno & Wati, 2020). Melalui kolaborasi ini, tantangan yang ada dapat diatasi dan e-Government dapat berjalan lebih efektif.

### **C. Peran E-Government dalam Meningkatkan Tata Kelola yang Transparan dan Partisipatif**

E-Government memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, mempercepat pelayanan publik, dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi (Bovaird & Loeffler, 2023). Di Desa Ambulu, penerapan teknologi informasi dalam layanan publik seperti pengelolaan data kependudukan dan perizinan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat akses informasi bagi masyarakat.

Selain itu, e-Government mendukung terciptanya tata kelola yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya platform digital yang memungkinkan masyarakat

untuk mengakses informasi dan memberikan masukan, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan desa menjadi lebih besar (Prasetyo, 2024). Pemerintah dapat lebih mudah memperoleh feedback dari warga terkait dengan kebijakan yang dijalankan, serta lebih cepat menanggapi kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam penerapan e-Government yang sukses. Masyarakat yang memiliki akses ke informasi dan pelatihan dapat memanfaatkan teknologi untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pemerintahan. Sektor swasta, melalui perusahaan teknologi, dapat memberikan solusi infrastruktur dan aplikasi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan desa secara digital.

#### **D. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Pelayanan Publik**

Pemanfaatan teknologi informasi melalui e-Government di Desa Ambulu dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi. Sistem informasi desa (SID) dan aplikasi SIPRAJA adalah contoh inovasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi (Tamrin et al., 2022). Pengelolaan data yang terintegrasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih cepat, sementara aparat desa dapat mengelola data dengan lebih akurat dan efisien.

Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pembaruan teknologi secara berkelanjutan dan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat desa dan masyarakat. Infrastruktur yang memadai, terutama dalam hal akses internet dan perangkat yang memadai, menjadi faktor penentu dalam kesuksesan penerapan e-Government (Setyawan et al., 2023). Selain itu, perlindungan data pribadi dan keamanan siber juga harus menjadi perhatian utama agar masyarakat merasa aman dalam memanfaatkan layanan digital.

Secara keseluruhan, e-Government dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan potensi teknologi untuk kemajuan Desa Ambulu.

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Pengembangan kapasitas aparatur desa melalui penerapan e-Government di Desa Ambulu, Kabupaten Jember, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun terdapat potensi besar dalam penerapan e-Government, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan utama. Penerapan e-Government tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penguatan pelatihan dan memperbaiki infrastruktur agar e-Government dapat dioptimalkan.

##### **SARAN**

1. Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah desa perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk memperbaiki infrastruktur teknologi, terutama jaringan internet dan akses perangkat teknologi.
2. Pelatihan Berbasis Kebutuhan: Mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aparatur desa dan masyarakat, serta mencakup aspek digital dan teknologi informasi agar semua pihak dapat memanfaatkan e-Government secara maksimal.
3. Koordinasi Lintas Sektor: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk mendukung integrasi dan keberlanjutan sistem e-Government.
4. Keterlibatan Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan melalui platform digital yang memfasilitasi akses informasi.
5. Pengawasan dan Keamanan Data: Memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan siber agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan layanan digital yang disediakan oleh pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. S., & Ibrahim, R. (2024). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digital Desa Moluo Kab. Gorontalo Utara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3793-3802.
- Hasbiah, H., Prasodjo, T., Saifuloh, N. I., Daud, A., & Awaluddin, M. (2024). Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Administrasi Publik Untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 46-53.
- Kurniawan, T. (2006). Hambatan dan Tantangan dalam mewujudkan Good Governance melalui penerapan e-Government di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi*, 194-197.
- Mendrofa, Y. F. J., Lase, D., Waruwu, S., & Mendrofa, S. A. (2023). Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi dalam meningkatkan pelayanan publik. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 11-21.
- Mayasiana, N. A. M., Maharani, I. S. M., & Munawaroh, L. M. (2023). Efektivitas Pelayanan Publik Digital J-Lahbako dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Seminalu*, 1(1), 455-464.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45-57.
- Nurlaila, N., Zuriatin, Z., & Nurhasanah, N. (2024). Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Bima. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 21-37.
- Panjaitan, E. H. H., & Listiorini, D. (2024). OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI MANAJEMEN DESA: STUDI KASUS PADA DESA X.
- Rizal, A. F. R. I. Z. A. L., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 76-91.
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., & Laksono, R. D. (2024). *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Sari, Y. K., Sholihah, Q., & Wanusmawatie, I. (2022). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.
- Sosiawan, E. A. (2015, June). Tantangan dan Hambatan dalam implementasi E-Government di Indonesia. In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)* (Vol. 1, No. 5).